



# Negosiasi Hak Kepemimpinan Perempuan di Ranah Publik ; Perspektif Theologi dan HAM Perempuan

**Yuniyanti Chuzaifah  
Wakil Ketua Komisi Nasional  
Anti Kekerasan terhadap Perempuan**

**Dipresentasikan pada Acara Kegiatan Kajian  
Titik Temu (KTT)**

**Diselenggarakan oleh Nurcholish Madjid Society  
Kamis, 31 Mei 2018**



*"Lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 pada tanggal 15 Oktober 1998."*



# Outline Presentasi

- 1. Sumber Perdebatan Teologis;**
- 2. Tafsir Progresif : Membaca dengan Lensa Kritis Adil Gender;**
- 3. Pandangan Teologis tentang Kepemimpinan Perempuan : Kerangka Normatif;**
- 4. Jejak Historis Kepemimpinan Perempuan dan Ruang Publik dalam Dunia Islam;**
- 5. Jejak Pemimpin Perempuan Kontemporer : Presiden Perempuan di Indonesia sebagai Muslim Majority ( Megawati);**
- 6. Menyoal Hak Kepemimpinan Perempuan : Privat ke Publik.**
- 7. Pola Leadership Perempuan;**
- 8. Ruang Publik Perempuan dan Tantangan;**
- 9. Upaya-Upaya Negosiasi Kepemimpinan Perempuan sebagai Hak Dasar.**

# Sumber Perdebatan Teologis

- Interpretasi surat Annisa' ; 34 (Arrijaal qawwam ala annisa bimaa fadlalallah ba'dlukum ala ba'din wa bima anfaquu)
- Hadist HR Bukhari ; Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan pada wanita.

# Tafsir Progresif : Membaca dengan Lensa Kritis Adil Gender

- **Pandangan ulama Indonesia** (Nazarudin Umar, Imam besar Istiqlal);
- **Qawwam** : bisa juga bermakna melindungi, mengayomi;
- **Analisa "arrijal-annisa"** adalah term gender/sosial dibanding kata "dzakar-untsa" sebagai term biologis;
- **Keyword sebagai syarat:** fadlalallah (keutamaan, kemampuan/kapasitas);
- **Nafaqa** : nafkah, kontribusi.

# Pandangan Teologis tentang Kepemimpinan Perempuan ; Kerangka Normatif

- **Grand syeikh Al-Azhar, Muhammad Sayyid Thanthawi (1999)** ; Islam tidak mengharamkan perempuan jadi presiden, walaupun lebih mengutamakan laki-laki dibanding perempuan.
- **Fatwa NU,1997** ; Wanita punya hak sebagai warga negara atas hak politiknya. Peran publik wanita sesuai prinsip Islam, dengan konsekwensi bahwa ia dapat dipandang mampu dan sesuai dengan kapasitas untuk menduduki peran sosial dan politis tersebut ( Kongres Alim Ulama NU)
- **Fatwa Muhammadiyah** ; Majelis tarjih dan tajdid (muktamar tarjih XVIII di Wiradesa dan Muktamar VIII Garut ) ; Islam tidak melarang perempuan menjadi hakim, menteri, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, kepala desa, dll (Adabul mar'ah fil Islam , p.52)



# Jejak Historis Kepemimpinan Perempuan dan Ruang Publik dalam Dunia Islam

- Terlibat memutuskan lokasi perang Uhud;
- Masjid sebagai centra kegiatan agama dan politik : bukan ruang theologis tapi juga ruang publik-politis;
- Aceh dengan 4 ratu perempuan : antithesis pada pola kepemimpinan Iskandar Muda yang expansif dengan kekuasaan non expansif , diplomatis, intelektual;
- Jejak Safiatudin : Qanun Ahlussunah waljamah ; Mambangun tradisi mahkamah syar'iiyah (catatan Teuku Di Mulek) dengan melibatkan perempuan;
- Kebijakan pemberian proteksi anak perempuan (rumah, emas, ladang).

# **Jejak Pemimpin Perempuan Kontemporer ; Presiden Perempuan di Indonesia sebagai Muslim Majority ( Megawati)**

- Memulai pemerintahan setelah konflik Poso , Sampang, Kalimantan;
- Lahir UU PKDRT;
- Pendirian KPK;
- Tata ekonomi ; hentikan penambangan Freeport dan pembagian proporsi hasil Arun daerah (Otsus);
- Menangkap 17 Jendral koruptor.

# Menyoal Hak Kepemimpinan Perempuan ; Privat ke Publik.

- Kapasitas lebih awal digunakan dibanding justifikasi fatwa : (perempuan jadi anggota parlemen NU, dibanding fatwa 1997). Sejumlah tokoh perempuan NU sbkm 1950an sudah jadi anggota konstituante, politisi, militer , AL, penerangan agama ( Asmah Sjahrunie, Mahmudah Mawardi, Marjamah Junaedi).
- Perempuan Aisiah menjadikan terbitan sebagai upaya merebut ruang publik saat dilarang ikut pertemuan di Padang.
- Ruang publik dinegosiasi dari isu-isu "privat, apolitis,.dll" dari isu kesehatan reproduksi yanv memantik kajian teologis yg bernas untuk isu publik.
- Kartini rebut ruang publik dalam pingitan dengan pikiran merdeka dan memerdekakan (merebut huruf latin dan transmisi lewat teknologi cetak)



# Pola Leadership Perempuan

- **Peggy Reeve Sunday** : kepemimpinan perempuan yg leading daripada controlling, mediating daripada dominating, orchestrating daripada dictating;
- **Negosiasi ruang publik di dunia maya** : Sana'a El Seif, Zahara Mortada, Zainobia (Egyptian chronicle);
- **Collective movement** : collective collegial untuk menumbuhkan banyak pemimpin;
- **feminist leadership** : sharing power, knowledge dan opportunity.

# Ruang Publik Perempuan dan Tantangan

- Radikalisme : mulai adopsi spirit feminism (keterlibatan perempuan sebagai combatan)
- Kebijakan diskriminatif dan pembatasan ruang publik (dokumentasi Komnas Perempuan thn 2010 ada 150 kebijakan dan menjadi 421 tahun 2017)
- Kebijakan yang membatasi mobilitas dan isu muhrim yang berdampak pada pengurangan ruang publik dan ruang politik perempuan
- Dideligitimasi dengan pola-pola maskulin
- Perempuan andalkan kapital sosial ( jaringan) , popularitas, tampilan estetik, geneologis, dll
- Kultur politik yang maskulin ; Kepemimpinan perempuan seharusnya bukan menguasai, leading, menggerakkan, ruang informal, tidak maskulin.

# Upaya-Upaya Negosiasi Kepemimpinan Perempuan sebagai Hak Dasar

- **Alimat-musawa** ; mendekonstruksi dan membangun metodologi dari realitas ; qiwamah dan wilayah
- **Kepemimpinan untuk perdamaian** ; Peacefull leadership ( Cedaw General Recom 30 dan Resolusi 1325 tentang peace and security oleh Elizabeth Rhein karena konflik Balkan, Anggota parlemen US walk out saat mau serang Irak)
- **Hak dari yang "mustadh'afin/direntankan"** ;
  - A. Pekka ; kepala keluarga perempuan.
  - B. Migran ; menyoal kepemimpinan dan muhrim.

# Yuniyanti Chuzaiifah

Wakil ketua Komnas Perempuan (2015-2019)

Ketua Komnas Perempuan (2010-2014)

Alumni ;

- Pondok Pesantren Pabelan IAIN Aqidah Filsafat
    - S2 ; Universitas Leiden
  - dan tengah selesaikan S3 di Univ Amsterdam.
- Kontak ; [yuni@komnasperempuan.go.id](mailto:yuni@komnasperempuan.go.id)

# Kontak Komnas Perempuan

Informasi lebih lanjut:

Komnas Perempuan

Jl. Latuharhari 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Telp: 021-3903963

Faks: 021-3903922

Email : [mail@komnasperempuan.go.id](mailto:mail@komnasperempuan.go.id)

Website : [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id)

Facebook : Komnas Perempuan – Group

Facebook : [www.facebook.com/stopktpsekarang](http://www.facebook.com/stopktpsekarang)

Twitter : [@KomnasPerempuan](https://twitter.com/KomnasPerempuan)

